

PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA WISATA DALAM
MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA DI DESA MANIMBAHOI KABUPATEN GOWA

Ridfan Rifadly Abadi¹, Rahmat Riwayat Abadi², M. Ilham Wardhana Haeruddin³, Annisa Paramaswary Aslam⁴, Nurul Fadilah Aswar⁵

¹ Universitas Negeri Makassar, e-mail: ridfan.rifadly.abadi@unm.ac.id

² Universitas Negeri Makassar, e-mail: rahmat.riwayat.abadi@unm.ac.id

³ Universitas Negeri Makassar, e-mail: ilham.wardhana@unm.ac.id

⁴ Universitas Negeri Makassar, e-mail: annisa.paramaswary@unm.ac.id

⁵ Universitas Negeri Makassar, e-mail: nurul.fadilah.aswar@unm.ac.id

Abstract

This community service activity aims to improve the competence of the Manimbahoi Village community, Gowa Regency, in effective tourism management and strengthen village institutions. This village has superior potential in the agricultural, plantation, and natural tourism sectors such as Bulu Baria, Lake Tanralili, Lohe Valley, and Lengkes Waterfall, but has not been optimally utilized due to low management capacity. The main problems include the lack of development of tourism standard operating procedures (SOPs) and the lack of integration of local products into the tourism ecosystem. The implementation method is carried out through the stages of preparation, training, mentoring, and evaluation. The training focused on tourism governance, institutional administration, and strategies for utilizing local potential. The results of the activity showed an increase in community understanding of orderly, effective, and responsible tourism management. The community also began to understand the importance of tourism SOPs and the integration of local products as added economic value. This activity contributed to the development of community empowerment science, tourism village management, and became a model for strengthening institutions based on local potential to improve community welfare.

Kata Kunci: *empowerment, institutional strengthening, tourism village*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi masyarakat Desa Manimbahoi, Kabupaten Gowa, dalam pengelolaan wisata secara efektif serta memperkuat kelembagaan desa. Desa ini memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, perkebunan, dan wisata alam seperti Bulu Baria, Danau Tanralili, Lembah Lohe, dan Air Terjun Lengkes, namun belum dimanfaatkan optimal karena rendahnya kapasitas pengelolaan. Permasalahan utama meliputi belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) wisata dan belum terintegrasinya produk lokal dalam ekosistem pariwisata. Metode pelaksanaan dilakukan

melalui tahapan persiapan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Pelatihan difokuskan pada tata kelola wisata, administrasi kelembagaan, serta strategi pemanfaatan potensi lokal. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan wisata yang tertib, efektif, dan bertanggung jawab. Masyarakat juga mulai memahami pentingnya SOP wisata dan integrasi produk lokal sebagai nilai tambah ekonomi. Kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pemberdayaan masyarakat, manajemen desa wisata, serta menjadi model penguatan kelembagaan berbasis potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *pemberdayaan, penguatan kelembagaan, desa wisata*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Dalam konteks pembangunan berbasis wilayah, pengembangan desa wisata menjadi pendekatan yang semakin relevan karena mampu mengintegrasikan potensi lokal dengan partisipasi masyarakat secara langsung. Desa wisata didefinisikan sebagai suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas ekonomi, maupun potensi alam yang dimiliki (Nuryanti, 1993). Selanjutnya, menurut Pitana & Diarta (2009) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, sehingga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Pariwisata berbasis masyarakat di daerah pedesaan seperti ini dinilai dapat menjadi pilar utama pembangunan ekonomi lokal berkelanjutan (Artamevia, et al., 2026). Menurut Devi & Rahaju (2025), pengembangan desa wisata merupakan strategi efektif untuk mendukung pelestarian lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan desa wisata diperlukan sebagai strategi mempersiapkan sumber daya manusia kompeten, sehingga pengelolaan potensi wisata dapat dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, sektor pariwisata mengalami transformasi yang sangat dinamis. Di mana, wisatawan tidak hanya mencari keindahan alam semata, tetapi juga ingin merasakan pengalaman interaksi langsung dengan

masyarakat dan budaya lokal. Oleh karena itu, pengelolaan desa wisata tidak hanya membutuhkan potensi sumber daya alam, tetapi juga memerlukan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan desa wisata, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), memiliki peran strategis dalam mengorganisir, mengelola, dan mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa kelemahan kelembagaan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan desa wisata di Indonesia (Sulistyo et al., 2023).

Desa Manimbahoi di Kabupaten Gowa merupakan salah satu desa yang memiliki potensi unggulan yang cukup besar, baik pada sektor pertanian, perkebunan, maupun wisata alam. Adapun destinasi wisata yang ditawarkan seperti Bulu Baria, Danau Tanralili, Lembah Lohe, dan Air Terjun Lengkesse merupakan aset wisata yang memiliki daya tarik tinggi dan berpotensi dikembangkan menjadi destinasi unggulan daerah. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan kapasitas pengelolaan kelembagaan dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih rendahnya kapasitas kelembagaan sehingga berdampak pada belum optimalnya pengelolaan potensi wisata, terutama dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pemasaran destinasi. Menurut, Priansa et al. (2024) bahwa pelatihan kelembagaan memperkuat kualitas pelayanan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, permasalahan yang dihadapi oleh Desa Manimbahoi tidak hanya terbatas pada aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan wisata, serta belum terintegrasinya produk lokal ke dalam ekosistem pariwisata. Padahal, integrasi produk lokal seperti kuliner, kerajinan, dan hasil pertanian ke dalam paket wisata merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat (Hadiwijoyo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang tidak terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal cenderung tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif teori pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan menjadi kunci utama dalam menciptakan kemandirian dan keberlanjutan pembangunan desa wisata. Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang memungkinkan individu atau kelompok untuk memperoleh kontrol atas keputusan dan sumber daya yang di mana akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan

demikian, program pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas organisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekosistem desa wisata yang baik. Menurut, Listyorini et al. (2021) menyatakan bahwa pelatihan dan pendampingan yang terstruktur mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan desa wisata secara signifikan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Digitalisasi pariwisata melalui media sosial dan platform digital lainnya telah terbukti mampu meningkatkan visibilitas dan daya tarik destinasi wisata secara signifikan (Sigala, 2018). Namun, keterbatasan literasi digital masyarakat desa seringkali menjadi hambatan dalam pemanfaatan teknologi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sebagai bagian dari penguatan kapasitas pengelolaan wisata.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Tanpa adanya intervensi yang tepat, potensi wisata yang besar tidak akan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan strategis melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan dan penguatan kelembagaan desa wisata. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga untuk membangun sistem pengelolaan wisata yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat Desa Manimbahoi diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola potensi wisata secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas, penyusunan SOP, serta integrasi produk lokal ke dalam ekosistem wisata diharapkan dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing desa wisata. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 12-14 Februari 2026, bertempat di Desa Manimbahoi, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil identifikasi awal yang menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki potensi wisata yang cukup besar, namun belum didukung oleh kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dan transfer ilmu pengetahuan (*knowledge transfer*) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelembagaan secara berkelanjutan (Zimmerman, 2000; Goodwin, 2016).

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan. Pendekatan partisipatif ini dinilai efektif dalam meningkatkan keberhasilan program pengabdian karena mampu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi (Creswell, 2018). Selain itu, pendekatan partisipatif merupakan kunci keberhasilan dalam pengembangan wisata berkelanjutan, dengan menekankan pendayagunaan sumber daya lokal (Maria & Darwis, 2022).

Pada tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai, terlebih dahulu oleh tim melakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, serta *focus group discussion* (FGD) dengan perangkat desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan masyarakat setempat. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, permasalahan, serta kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Tujuannya untuk dapat mengidentifikasi permasalahan, tantangan, dan kesenjangan pengetahuan yang ada terkait dengan literasi keuangan di kalangan siswa. Dari hasil survei awal menunjukkan bahwa permasalahan mitra terletak pada masih rendahnya kapasitas kelembagaan Pokdarwis dalam pengelolaan wisata, belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) wisata, minimnya keterampilan masyarakat dalam pengelolaan dan pelayanan wisata, serta belum terintegrasinya produk lokal dalam ekosistem pariwisata.

Tahap selanjutnya tahap pengenalan dan proses yang merupakan inti dari kegiatan yaitu, pemaparan materi dan pelatihan yang disampaikan kepada masyarakat. Metode ini dipilih karena terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat secara simultan (Listyorini et al., 2021). Selain itu, pendekatan *experiential learning* memungkinkan

peserta untuk belajar melalui pengalaman langsung, sehingga meningkatkan retensi pengetahuan (Kolb, 2015). Di mana, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada metode penyampaian yang bersifat ceramah secara interaktif untuk memberikan masyarakat pemahaman terkait dengan pengelolaan wisata. Setiap pemateri tidak lupa memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dan menanggapi hal-hal yang telah disampaikan. Setelah penyampaian materi selanjutnya, pelatihan dan praktik langsung seperti penyusunan SOP, simulasi pelayanan wisata, serta pembuatan konten promosi. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan penyerapan materi. Materi yang disampaikan secara bertahap yang dibagi menjadi empat modul materi.

Adapun materi pelatihan disusun berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi oleh siswa terkait dengan literasi keuangan, yang kemudian dibagi ke dalam empat modul utama.

Tabel 1. Modul Pelatihan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan

No.	Modul	Materi	Keterangan
1.	Modul 1	Pengantar Desa Wisata dan Penguatan Kelembagaan	Peserta diberikan pemahaman mengenai konsep desa wisata, prinsip pengelolaan berbasis masyarakat, serta peran strategis kelembagaan dalam pengembangan wisata. Materi ini juga mencakup pembentukan struktur organisasi Pokdarwis dan pembagian tugas yang jelas. Penguatan kelembagaan ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata.
2.	Modul 2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wisata	Peserta dilatih untuk menyusun SOP sebagai pedoman dalam pengelolaan wisata, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan standar pelayanan yang konsisten dan professional.
3.	Modul 3	Pengembangan Produk Lokal dan Paket Wisata	Peserta diberikan pelatihan terkait integrasi produk lokal seperti kuliner, kerajinan, dan hasil pertanian ke dalam paket wisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat dan memperkuat daya tarik wisata (Hadiwijoyo, 2018).
4.	Modul 4	Digitalisasi dan Promosi Wisata	Fasilitator mengenalkan strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan media sosial serta

membantu membuat konten promosi yang relevan dengan potensi desa.

Selanjutnya pada tahapan terakhir yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Setelah sesi materi dan praktik selesai terlaksana, kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur sejauh mana efektivitas program. Evaluasi meliputi pengukuran peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta pengumpulan umpan balik kualitatif mengenai pengalaman mereka. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi tindak lanjut, termasuk pendampingan berkelanjutan dan penguatan program di masa mendatang. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan program pengabdian dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Tantangan dan permasalahan utama yang dihadapi masyarakat selama kegiatan adalah masih banyak masyarakat belum memahami terkait dengan pentingnya pengelolaan kelembagaan secara professional dan masih minimnya pemahaman literasi digital sebagai media promosi. Sehingga dengan kegiatan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan potensi desa dengan lebih baik di masa depan. Salah satu pengukuran keberhasilan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengelolaan desa wisata serta mampu memanfaatkan teknologi digital dalam mengintegrasikan potensi wisata di Desa Manimbahoi, Kabupaten Gowa.



Gambar 1. Alur Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Manimbahoi Kabupaten Gowa diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengelola wisata, pelaku UMKM, serta masyarakat umum yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan potensi wisata. Kegiatan dilaksanakan di balai desa dengan suasana yang kondusif dan partisipatif. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, yang tercermin dari keaktifan dalam diskusi, keterlibatan dalam praktik penyusunan SOP, serta kontribusi dalam pengembangan ide paket wisata. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan desa wisata berbasis kelembagaan. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kolektif dalam mengelola sumber daya secara mandiri (Zimmerman, 2000).



Gambar 2. Pembukaan Pelatihan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pentingnya penguatan kelembagaan kelompok sadar wisata. Pada sesi pertama, peserta pelatihan terlebih dahulu diberikan pengantar materi terkait pengantar literasi kelembagaan dan pentingnya kelompok sadar wisata. Pengantar literasi kelembagaan dan pentingnya kelompok sadar wisata disampaikan melalui ceramah interaktif yang memicu diskusi aktif di antara masyarakat. Dimana, banyak masyarakat menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap materi tersebut, terutama ketika dikaitkan dengan manajemen wisata, pelayanan wisatawan, dan administrasi. Selain itu, kegiatan penguatan kelembagaan ini juga dilakukan melalui

pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, serta penyusunan visi dan misi pengelolaan desa wisata. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap peran dan fungsi kelembagaan dalam pengelolaan wisata.

Selanjutnya, pada sesi kedua dan ketiga berfokus pada pemahaman peserta terkait dengan penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta praktik langsung tentang bagaimana Menyusun dokumen SOP wisata. Dalam hal ini, bagaimana kemudian SOP tersebut akan berguna bagi masyarakat dalam menjalankan pengelolaan wisata yang baik. Dalam hal ini, peserta secara aktif terlibat dalam penyusunan SOP melalui diskusi kelompok dan simulasi kasus. Di mana, pada sesi ini dapat dilihat dengan jelas antusiasme masyarakat, ketika berdiskusi dan saling bekerja sama dalam menyelesaikan soal latihan kasus tersebut. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya standar pelayanan.

Pada sesi keempat dilanjutkan dengan pemberian materi yaitu mengintegrasikan produk lokal dalam ekosistem wisata dan memperkenalkan pemanfaatan digital, khususnya media sosial dalam upaya mempromosikan wisata. Pengintegrasian produk lokal dalam paket wisata dan pemanfaatan media social seperti, Instagram, Facebook, Youtube, dan Tiktok menjadi perhatian yang sangat menarik bagi masyarakat. Dalam hal ini, peserta dilatih untuk mengemas produk tersebut menjadi bagian dari paket wisata yang selanjutnya di intergasikan dengan pembuatan konten digital.

Kegiatan kemudian di akhiri dengan evaluasi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk bertanya terkait dengan materi dan praktik yang telah dilakukan. Selain itu untuk menghindari kebosanan dan menguji pemahaman mereka satu sama lain, selanjutnya para peserta bermain tanya jawab. Dimana, salah satu dari mereka akan membuat pertanyaan dan kemudian masyarakat yang lain akan menjawabnya.



Gambar 3. Sosialisasi dan Praktik Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata

Dari keseluruhan rangkaian kegiatan dapat dilihat masyarakat sangat antusias berpartisipasi hingga akhir kegiatan, Dimana, tercermin dari perubahan sikap yang mereka tunjukkan pada saat awal pelatihan masih banyak yang kebingungan dengan pengelolaan wisata berbasis kelembagaan. Namun, di akhir pelatihan mereka mulai tampak percaya diri yang dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dalam bertanya dan kemampuan masyarakat dalam Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan wisata. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan campuran ceramah-praktik-*discussion* secara efektif dapat meningkatkan pemahaman siswa.

Pembahasan

Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan secara efektif mampu mengatasi mengatasi kesenjangan dalam pendidikan formal terkait dengan keterampilan manajerial dalam pengelolaan wisata. Dengan membekali masyarakat dengan kemampuan manajemen wisata dan pelayanan wisata, hal tersebut nantinya akan menjadi fondasi bagi kemandirian masyarakat di masa depan, memungkinkan masyarakat untuk merencanakan potensi wisata mereka, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu dampak penting yang teridentifikasi adalah potensi program dalam menumbuhkan semangat kewirausahaan berbasis wisata, seperti usaha kuliner dan jasa wisata. Hal ini sejalan dengan konsep desa wisata sebagai penggerak ekonomi lokal (Dewi, 2013). Mengingat bahwa beberapa siswa masyarakat sudah terlibat dalam kegiatan pengelolaan wisata, sehingga pembekalan keterampilan ini secara langsung memberdayakan mereka untuk mengelola wisata dan produk lokal sampingan mereka dengan lebih baik. Ini dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengeksplorasi potensi ekonomi mereka, berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun program menunjukkan keberhasilan yang signifikan, beberapa tantangan juga teridentifikasi, seperti variasi tingkat pemahaman awal masyarakat dan kebutuhan akan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan pembentukan kebiasaan jangka panjang. Meskipun demikian, pendekatan pelatihan berbasis praktik dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat secara signifikan. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pengabdian ini mampu menjembatani kesenjangan

antara potensi dan kapasitas pengelolaan desa wisata. Pendekatan yang digunakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta partisipasi masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Desa Wisata dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata di Desa Manimbahoi Kabupaten Gowa menunjukkan hasil yang positif. Di mana, program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun kesadaran dalam pengelolaan desa wisata secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pelaku UMKM, telah mengalami peningkatan pemahaman terkait konsep desa wisata, pengelolaan kelembagaan, serta pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam mendukung profesionalitas layanan wisata. Selain itu, peserta juga mampu menyusun dokumen SOP sederhana serta merancang paket wisata yang terintegrasi dengan potensi lokal, seperti produk kuliner, hasil pertanian, dan kerajinan masyarakat.

Dari aspek keterampilan, kegiatan pelatihan dan praktik langsung memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pelayanan wisata, pengelolaan administrasi, serta strategi promosi berbasis digital. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kepercayaan diri peserta dalam mengelola aktivitas wisata serta kemampuan mereka dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi destinasi.

Secara kualitatif, kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya pengelolaan wisata yang tertib, terstruktur, dan berorientasi pada keberlanjutan. Masyarakat mulai memahami bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam, tetapi juga pada kekuatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan kapasitas, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kemandirian dan keberlanjutan desa wisata.

Adapun saran sebagai tindak lanjut dalam kegiatan ini:

1. Penguatan kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, diperlukan pendampingan lanjutan bagi Pokdarwis dalam mengimplementasikan struktur organisasi dan tugas yang telah disusun. Penguatan kelembagaan secara berkelanjutan akan memastikan konsistensi dalam pengelolaan desa wisata.
2. Penyempurnaan dan implementasi SOP wisata. Dokumen SOP yang telah disusun perlu disempurnakan dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas wisata. Evaluasi berkala terhadap penerapan SOP juga diperlukan untuk menjaga kualitas layanan.
3. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Disarankan untuk melaksanakan pelatihan lanjutan secara berkala, seperti pelatihan pelayanan wisata tingkat lanjut, manajemen destinasi, serta pengelolaan usaha berbasis wisata. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing desa wisata.
4. Integrasi UMKM dalam ekosistem wisata. Perlu dilakukan penguatan sinergi antara sektor pariwisata dan UMKM lokal melalui pengembangan produk unggulan desa yang dapat dijadikan sebagai bagian dari paket wisata, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
5. Optimalisasi digitalisasi dan promosi wisata. Pemanfaatan teknologi digital perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal pemasaran dan branding destinasi wisata. Pemerintah desa diharapkan dapat mendukung penyediaan akses internet dan pelatihan lanjutan terkait digital marketing.

REFERENSI

- Artamevia, M., Lubis, M., & Mukti, I. Y. (2025). Strategi Pembangunan Desa Wisata untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Desa Bi'ih, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.55606/jempper.v5i1.5614>.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>.
- Devi, S. S., & Rahaju, T. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Simathani Marurup Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 24–51. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.261>.
- Goodwin, H. (2016). *Responsible Tourism: Using Tourism for Sustainable Development*. Oxford: Goodfellow Publishers.

- Hadiwijoyo, S. S. (2018). *Perencanaan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Kolb, D.A. (2015). *Experiential learning: experience as the source of learning and Development Second Edition*. Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education, Inc.
- Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., Wuntu, G., & Gunawan, M. M. (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis dalam Merintis Desa Wisata melalui Penciptaan Identitas dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*; 5(2), 491–504. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.4083>
- Maria, G. A. R., & Darwis, R. S. (2022). Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 379–385.
- Nuryanti, W. (1993). Concept, Perspective and Challenges in Tourism Village. *Tourism Review*, 48(3), 52–54.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar ilmu pariwisata*. Yogyakarta.
- Priansa, D., Octaviany, V., & Hanifa, F. H. (2024). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan dan Pelayanan Desa Wisata Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. *BINA CIPTA*, 3(2), 53–62. <https://doi.org/10.46837/binacipta.v3i2.50>.
- Sigala, M. (2018). Social media and customer engagement in the tourism industry. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 30(1), 269–284.
- Sulistyo, A., Yudiandri, T. E., Annisa, R. N., & Mudiono, M. (2023). Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Melalui Kampanye Sadar Wisata 5.0 Dalam Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4438–4449.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp.43–63). New York, NY: Springer.